

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Secara umum pendekatan penelitian terdiri dari dua kategori, penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Sedangkan jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi dan jenis data.⁷⁵ Tujuan penelitian ini adalah untuk memecahkan permasalahan melalui proses pembelajaran (*learning process*) dari sistem lama ke sistem baru serta mencari model kolaborasi yang sesuai untuk pengelolaan Kawasan Perbatasan antar negara di Kepulauan Riau. Maani dan Cavani (2000) menggunakan dua pendekatan dalam berpikir sistem, yaitu *hard systems thinking* dan *soft systems thinking*.⁷⁶

Hard systems thinking digunakan untuk menganalisis sistem bermasalah yang telah terstruktur dengan jelas sehingga lebih sesuai dengan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan *soft systems thinking* lebih sesuai untuk menganalisis masalah yang tidak terstruktur dengan jelas dan belum terdefinisi dengan baik. Oleh sebab itu pendekatan dalam penelitian ini lebih sesuai dengan data kualitatif. Berdasarkan hal tersebut, maka metodologi sistem lunak (*soft systems methodology*) lebih sesuai dengan pendekatan penelitian kualitatif.

⁷⁵ Sugiyono, 1993. *Metodologi Penelitian Administrasi*, hal 1.

⁷⁶ Maani, Kambiz E dan Robert Y, Cavani, 2000. *Sistem Thinking and Modelling Understanding Change and Complexity*, Pearson Education, New Zealand.

Lebih lanjut Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara *holistic* dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa”.⁷⁷ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka dimungkinkan lahirnya komunikasi antar subyek dan sekaligus adanya pemahaman secara bersama-sama atas fenomena social, baik oleh subyek yang diteliti maupun oleh peneliti⁷⁸.

Menurut Gordon penelitian kualitatif banyak digunakan dalam penelitian social yang menunjukkan pada penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, juga tentang fungsionalisasi organisasi.⁷⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data deskriptif berupa tulisan, ungkapan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati⁸⁰. Sedangkan masalah penelitian akan dijawab melalui penjelasan atas pertanyaan penelitian berdasarkan data di lapangan yang telah di interpretasi dengan pendekatan teori yang dirumuskan dalam tinjauan pustaka.

Sedikitnya ada dua kesulitan mendasar yang sering dihadapi oleh seorang peneliti atas berbagai pengalaman riset. *Pertama*,

⁷⁷ Moeleng 2007

⁷⁸ Cresswel, John W, 1994. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approach*, Sage Publication, London.

⁷⁹ Gordon Strauss, Anselin & Juliet Corbin, 1997, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*. Penyadur H.M. Djunaidi Ghony, PT. Bina Ilmu Surabaya.

⁸⁰ Gordon Strauss, Anselin & Juliet Corbin, 1997, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*. Penyadur H.M. Djunaidi Ghony, PT. Bina Ilmu Surabaya.

membangun argumen untuk memperoleh dan memilih data, dan; *kedua*, menafsir dan menyimpulkan temuan data. Dilandasi *problem* yang demikian tersebut, sengaja penelitian ini dirancang agar mampu “memperoleh sekaligus menafsirkan” data, tetapi dengan tetap sensitif mempertimbangkan dan meminimalisasi adanya pem-bias-an hasrat subyektif peneliti. Kendatipun uraian analisis berangkat dari problematisasi teoritis dengan pengajuan asumsi-asumsi kritis dan lebih mendasarkan pada temuan realitas di lapangan, namun dengan meminjam istilah Chalmers, riset ini juga berupaya mencegah terperosoknya pada induktivisme naif.⁸¹

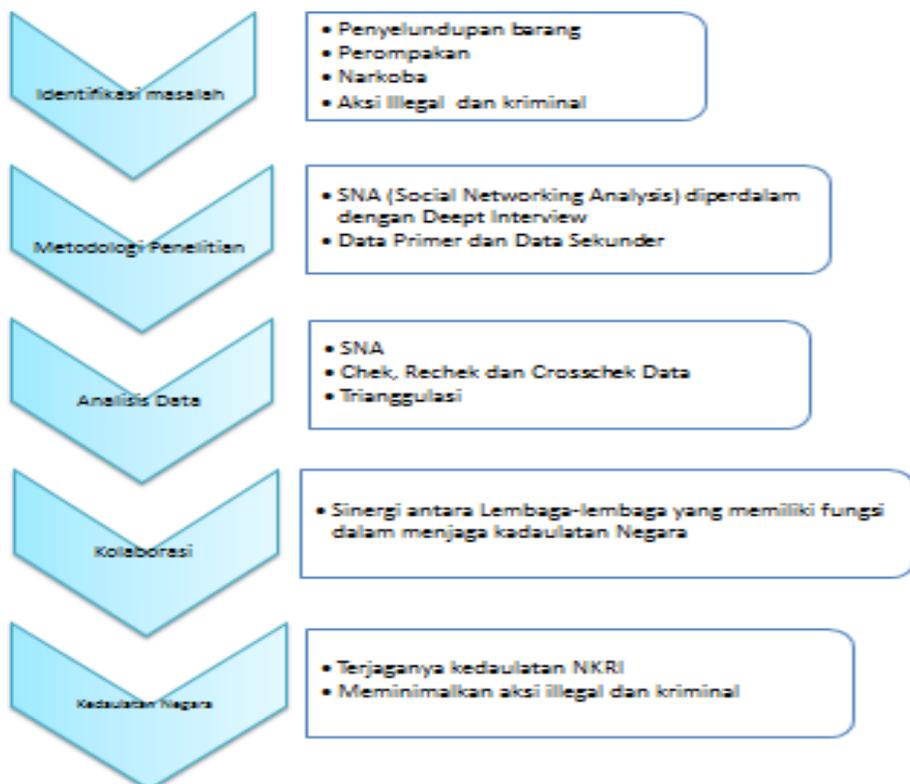
Untuk mengatasi persoalan perolehan dan pilihan data, sengaja tidak ada sensor ketat di dalam menentukan data mana yang akan diambil. Adapun pertimbangannya adalah untuk menghindari reduksi yang berlebihan. Hanya saja, untuk menjaga fokus dan “relevansi” data berkenaan dengan topik permasalahan, serta kepentingan dalam memudahkan analisis, maka klasifikasi kebutuhan data menjadi prasarat sebelum observasi dilakukan.

Dengan demikian, jika informasi dan sekaligus data awal telah didapatkan saat melakukan aktivitas sosial sebelum melakukan penelitian, maka peneliti akan melengkapinya dengan sekumpulan daftar kebutuhan data pokok (*primer* maupun *secondary*). Selanjutnya

⁸¹ Gordon Strauss, Anselin & Juliet Corbin, 1997, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*. Penyadur H.M. Djunaidi Ghony, PT. Bina Ilmu Surabaya

peneliti melakukan identifikasi beberapa sasaran sumber data yang diperoleh ditingkat instansional maupun ditingkat personal/individual yang ditopang oleh *interview guide* yang diturunkan dari konseptualisasi sebagai perangkat alat analisisnya untuk menelusuri jawaban atas permasalahan penelitian.

Bagan 3.1 Skema Pendekatan Penelitian



Sumber: data yang diolah.

3.2. Data Penelitian

3.2.1. Jenis Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data Kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata atau yang berwujud pernyataan-pernyataan verbal, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, analisis dokumen, diskusi terfokus, dan observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (*transkrip*). Sedangkan data kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil pendistribusian angket kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik berupa data lisan dengan penjelasan mengenai pembahasan maupun dalam bentuk angka-angka yang berguna untuk menunjang hasil dan kedalaman penelitian.

3.2.2. Data yang Diperlukan

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini pada prinsipnya adalah data apa saja yang diperlukan untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Hal demikian merupakan dasar berfikir dalam pendekatan penelitian kualitatif. Namun demikian, tentu saja perlu menyeleksi data untuk memastikan adanya relevansi data dengan permasalahan yang akan dilihat. Data yang diperlukan tentunya data yang dapat menguraikan tentang kolaborasi antara lembaga-lembaga Negara yang memiliki tugas dan wewenang menjaga

kedaulatan negara melalui pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kepulauan Riau baik berupa data primer dan data sekunder.

3.2.3. Sumber Data

Pada dasarnya penelitian kualitatif lebih banyak menekankan pada data-data yang langsung dari pelaku fenomena sosial atau orang yang dianggap tahu dan atau mengalami fenomena tersebut. Hal ini disebabkan karena sifat data yang digunakan lebih pada upaya membangun sebuah kerangka dan permasalahan. Oleh sebab itu maka siapa saja dapat dijadikan sumber data asalkan tetap berkaitan dengan masalah penelitian. Namun demikian pemilihan sumber data ini akan sangat menentukan kualitas dari data yang diperoleh. Untuk itu maka penelitian ini tidak menutup kemungkinan adanya sumber data baru apabila permasalahan dilapangan menuntut hal yang demikian. Sumber data tersebut dapat berupa data primer dan data sekunder yang terperinci antara lain sebagai berikut:

- 1) Data primer meliputi hasil angket, wawancara dan observasi. Angket didistribusikan ke seluruh *stakeholder* yang terlibat langsung dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan yakni Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Badan maupun Bagian yang memiliki tugas dan wewenang dalam mengelola daerah perbatasan. Disamping pemerintah Provinsi, terdapat 5 (lima) Kabupaten/Kota yang memiliki SKPD dengan tugas dan wewenang untuk mengelola kawasan perbatasan yaitu Pemerintah Kota Batam dengan SKPD

bernama Badan Pengelola Perbatasan dan Pertanahan, Pemerintah Kabupaten Bintan dengan SKPD bernama Bagian Pengelola Perbatasan, Pemerintah Kabupaten Karimun dengan SKPD bernama Badan Pengelola Perbatasan, Pemerintah Kabupaten Natuna dengan dan Pemeritah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dengan SKPD bernama Badan Pengelola Perbatasan serta lembaga-lembaga yang menjadi anggota BNPP baik Kementrian maupun Lembaga ditingkat pusat. Untuk mempermudah dalam pengisian angket, maka angket dibuat dengan menggunakan “*google form*”. *Google form* merupakan sebuah *tools* yang diharapkan dapat mempermudah responden untuk mengisi dan mengirimkan kembali kepada peneliti sehingga tidak membuang banyak waktu serta biaya. Berikut *link* yang dapat diakses oleh responden dalam memberikan respon/jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar terkait dengan *collaborative governance* dengan merujuk pendapatnya Noorsyamsa Djumara.⁸² Angket tersebut selanjutnya digunakan untuk mengetahui bagaimana pola kolaborasi yang terjadi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan di wilayah Kepulauan Riau baik ditingkat daerah yaitu Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan ditingkat

⁸² Noorsyamsa Djumara, *Colaborative Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan*, diakses dari https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0nu4ShX5W1xSzr8TJDX_P4ElpwWuZYWmIN1_HumENVEoVxg/viewform?c=0&w=1

pusat yang menjadi anggota BNPP. Bentuk angket yang disebarkan berupa sejumlah pertanyaan dengan bentuk terbuka dan bentuk tertutup. Dikatakan angket yang tertutup karena dalam angket sudah disediakan sejumlah opsi jawaban, sedangkan angket dengan sifatnya yang terbuka bertujuan untuk menyediakan peluang bagi responden guna menyampaikan pendapat yang tidak tersedia dalam pilihan jawaban. Dengan demikian maka argumentasi antara *stakeholder* satu dengan yang lainnya dimungkinkan untuk berbeda. Data yang diperoleh melalui penyebaran angket ini adalah data yang sifatnya ordinal dan nominal serta dalam bentuk kualitatif/jawaban terbuka. Disamping data primer berupa angket, data primer lainnya diperoleh melalui wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*depth interview*) dilakukan kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam mengelola kawasan perbatasan yang ada di daerah maupun di pusat. Dengan demikian informasi satu dengan informasi yang lain akan saling melengkapi guna mengurai permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan. Data berupa angket dan *depth interview* diperoleh dari pejabat berwenang di masing-masing institusi pengelola perbatasan di wilayah Kepulauan Riau.

- 2) Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap informasi. Data sekunder diperoleh melalui arsip penting yang ada dimasing-masing lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kawasan

perbatasan, *Momorandum of Understanding* (MOU), Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Keputusan Presiden (Kepres), Peraturan Menteri (Permen) dan data lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau.

3.2.4. Informan

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel bisa diganti dengan istilah lain seperti informan atau partisipan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Poerwandari yang mengatakan bahwa “istilah sampel diganti dengan sebutan partisipan atau informan”⁸³. Menurut Poerwandari, besar kecilnya sampel/informan dalam penelitian kualitatif ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya, seperti desain penelitian, dan metode penelitian.⁸⁴

Sedangkan dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi tidak ada aturan pasti jumlah partisipan. Penentuan jumlah partisipan dapat ditentukan berdasarkan pendapat dari Creswell, dimana ukuran sampel yang digunakan adalah 5-25 orang⁸⁵, sedangkan pendapat dari Morse, ukuran sampel dalam penelitian fenomenologi paling sedikit 6 orang. Namun demikian dalam literatur lainnya, pemilihan partisipan dalam penelitian kualitatif pada umumnya subjek

⁸³ Poerwandari, E.K. (2009). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilakumanusia*. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

⁸⁴ Onwuegbuzie & Leech, op. cit.

⁸⁵ Creswell, J.W. (2003). *Desain penelitian: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif*. Jakarta: KIK Press

atau sumber data diarahkan tidak pada jumlah sampel yang besar, akan tetapi ditentukan berdasarkan kasus-kasus yang sesuai dengan masalah penelitian, serta tidak ditentukan secara tegas diawal penelitian dan dapat berubah dalam hal jumlah dan karakteristik sampel⁸⁶. Beberapa peneliti seperti Poerwandari menyarankan untuk lebih mementingkan tercapainya titik jenuh⁸⁷. Bahkan beberapa peneliti lainnya seperti mengatakan bahwa ukuran sampel dalam penelitian kualitatif tidak perlu terlalu besar, karena justru akan mempersulit dalam mengekstrak data yang terlalu banyak. Akan tetapi, jumlah sampel yang terlalu kecil juga akan sulit dalam mencapai saturasi data, saturasi teoritis dan kelebihan informasi⁸⁸.

Pemilihan partisipan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Selain merupakan strategi *sampling* yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif, namun juga merupakan metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian⁸⁹. Pada penelitian *Collaborative Governance* dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau ini, kriteria yang digunakan dalam pemilihan partisipan adalah *stakeholders* yang pada

⁸⁶ Mason, M. (2010). Sample size and saturation in PhD studies using qualitative interviews. *Forum Qualitative Social Research*, 11.

⁸⁷ Poerwandari, E.K. (2009). *Pendekatan kualitatif untuk penelitian perilakumanusia*. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

⁸⁸ Onwuegbuzie, A.J., & Leech, N.L. (2007). Sampling desain in qualitative research: Making the sampling process more public. *The Qualitative Report*, 12, 238-254.

⁸⁹ Mack, N., Woodson, C., MacQueen, M.K., Guest, G., Namey, E. (2005). *Kualitatif research metode: A data collector's field guide*. USA: FamilyHealth International.

saat dilakukan penelitian ini menduduki jabatan strategis dalam institusi (Badan/Bagian) pengelola kawasan perbatasan baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Dengan demikian diharapkan informasi yang diberikan sesuai dengan situasi dan kondisi baik di lapangan maupun di pemerintahan.

3.2.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting agar penelitian berhasil dengan baik. Teknik pengumpulan data berkaitan erat dengan bagaimana cara data di kumpulkan, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) teknik yaitu angket, observasi dan wawancara.

- 1) Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk selanjutnya dijawab. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket dalam penelitian ini dirasa cukup sulit mengingat responden tersebar di berbagai tempat baik di pusat (Jakarta) maupun di daerah Kepulauan Riau yang secara geografis sangat sulit diangkat mengingat geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari 96% lautan. Disamping itu ada beberapa item pertanyaan yang harus dijawab oleh Pimpinan masing-masing lembaga seperti Kepala Bagian, Kepala Badan dan bahkan Menteri. Terdapat beberapa prinsip yang perlu

diperhatikan dalam penyusunan angket menurut Uma Sekaran terkait dengan prinsip penulisan angket, prinsip pengukuran dan penampilan fisik. Prinsip Penulisan angket menyangkut beberapa faktor antara lain:

- a) Isi dan tujuan pertanyaan artinya jika isi pertanyaan ditujukan untuk mengukur maka harus ada skala yang jelas dalam pilihan jawaban.
- b) Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh istilah-istilah bahasa Inggris pada responden yang tidak mengerti bahasa Inggris, dsb.
- c) Tipe dan bentuk pertanyaan apakah terbuka atau tertutup. Jika terbuka artinya jawaban yang diberikan adalah bebas, sedangkan jika pernyataan tertutup maka responden hanya diminta untuk memilih jawaban yang disediakan⁹⁰.

Terkait dengan prinsi-prinsip tersebut maka angket dalam penelitian ini dibuat sangat sederhana dengan bahasa yang lugas dengan menyediakan bentuk pertanyaan ada yang bersifat terbuka dan tertutup.

- 2) Kajian Pustaka dan Studi Dokumentasi. Kajian pustaka digunakan untuk mengetahui berbagai penelitian, tulisan atau studi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema

⁹⁰ Sugiyono, 2007 Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta, hal 163.

penelitian. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan berbagai kebijakan, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil kesepakatan dari *stakeholder* khususnya yang ada di BNPP, Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dan tulisan lain yang berkaitan dengan pengelolaan Kawasan Perbatasan.

- 3) Wawancara. Wawancara mendalam (*depth interview*) dilakukan untuk mendapatkan data persepsi atas pola hubungan lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan maupun aspirasi dan gagasan yang berkembang dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan di masa yang akan datang. Narasumber dalam wawancara ini adalah pimpinan dari masing-masing institusi yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Kawasan Perbatasan.
- 4) Diskusi antar *stakeholder*. Diskusi antar *stakeholder* dilakukan setelah diperoleh kesimpulan sementara penelitian dari hasil pengumpulan data baik dari studi dokumentasi, wawancara dan angket yang kemudian dibawa kedalam diskusi *stakeholder* atau yang biasa dikenal dengan istilah Fokus Grup Diskusi atau FGD. Dalam diskusi tersebut diharapkan terungkap data tentang relasi yang terjadi dalam pengelolaan, pemahaman dan gagasan

bersama antar *stakeholder* tentang masa depan Kawasan Perbatasan.

Selanjutnya untuk merumuskan definisi dasar dalam permasalahan yang diteliti, peneliti menggunakan teknik yang dirumuskan oleh Checkland dalam akronim CATWOE yaitu *Costumers, Actors, Transformation process, World view, Owners, Enviromentals Constraints*⁹¹. Yang dimaksud CATWOE dalam penelitian ini adalah

- a) *Costumer* adalah pihak-pihak yang diuntungkan atau dirugikan dari Kawasan Perbatasan
- b) *Actors* adalah pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kepulauan Riau
- c) *Transformation process* adalah aktifitas yang merubah masukan menjadi keluaran
- d) *World view* adalah pemahaman berbagai pihak tentang makna yang mendalam atas situasi permasalahan
- e) *Owners* adalah pihak yang dapat menghentikan atau membentuk aktifitas organisasi.
- f) *Enviromental constraints* adalah hambatan dalam lingkungan sistem yang tidak dapat dihindari.

Berdasarkan akronim CATWOE diatas, maka CATWOE yang dimaksud dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan adalah terlihat sebagaimana dalam tabel berikut;

⁹¹ Peter B. Checkland, and Scholes, J., 1990, *Soft Systems Methodology in Action*, England: John Wiley & Sons Ltd. hal 35-36

**Tabel 3. 1 Formulasi Definisi Dasar Penelitian Dengan Pendekatan
CATWOE**

Akronim	Deskripsi	Rincian
(1)	(2)	(3)
Customers	Seluruh masyarakat yang ada di Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku Usaha • Masyarakat • Masyarakat dari luar Kepri
Actors	Para pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kepulauan Riau	<p>Government Sector</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat (BNPP) • Pemerintah Provinsi (BPPD Kepri) • Pemerintah Kab/Kota (BPPD Kab/Kota) <p>Non-Government Sector</p> <ul style="list-style-type: none"> • LSM • Masyarakat, Akademisi yang memiliki perhatian terhadap perbatasan
Transformation process	Aktifitas atau kegiatan-kegiatan yang membuat masukan menjadi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana kebijakan pengelolaan perbatasan dirumuskan • Bagaimana kebijakan pengelolaan perbatasan diimpleentasikan • Bagaimana kebijakan pengelolaan perbatasan dievaluasi
World view	Persepsi dan pandangan terhadap Kawasan Perbatasan	Persepsi <i>costumer</i> dan <i>actor</i> yang terlibat dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan yang ada dan yang seharusnya ada
Owners	Para pihak yang	BNPP, BPP Provinsi, BPP

Akronim	Deskripsi	Rincian
(1)	(2)	(3)
	memegang kendali utama atas Kawasan Perbatasan	Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna Anambas dan BPPP Kota Batam
Enviromental constraints	Lingkungan sebagai parameter	UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara, UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional, UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Sumber: Modifikasi Model Chekland

3.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian digunakan untuk memberikan batasan-batasan atas objek dan subjek yang akan diteliti. Ruang lingkup penelitian ini adalah *stakeholders* yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan mulai dari tingkat pusat, wilayah atau provinsi hingga tingkat daerah yaitu kabupaten/kota yang memiliki lembaga pengelola perbatasan serta lembaga vertikal lainnya seperti TNI dan POLRI dan BAKAMLA. Sebagai pijakan maka UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dijadikan dasar dari BNPP. Sedangkan UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijadikan sebagai acuan kewenangan daerah dalam mengelola perbatasan. Selanjutnya UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

Nasional sebagai dasar TNI baik AL, AD maupun AU dalam menjalankan tugasnya. Terakhir adalah UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan pihak POLRI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

3.4. Analisa Data Kualitatif

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara, sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran angket. Sebelum dilakukan analisis terhadap data kualitatif, peneliti terlebih dahulu melakukan pengujian keabsahan data. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah upaya untuk melakukan *check, recheck, and cross check* terhadap data yang diperoleh. Teknik triangulasi merupakan prosedur pencocokan data melalui beberapa sumber yang berbeda sehingga diperoleh data yang akurat atau *valid*. Hal tersebut dilakukan pada beberapa aspek penting dari data yakni sumber data, metode, penyidik dan teori.

Triangulasi dengan menggunakan pendekatan sumber dilakukan dengan jalan; (1) membandingkan data hasil penelitian dengan hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi; (3) membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang sepanjang waktu; (4)

membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan pendapat atau pandangan dari orang lain; (5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Metode cek data dilakukan melalui pengecekan data pertama dengan data kedua, dicekkan lagi dengan data ketiga dan seterusnya. Dengan demikian maka masing-masing data akan dicekkan pada data yang lainnya untuk memastikan kebenaran dari data tersebut.

Setelah semua data diolah, dan dilakukan *cek*, *recheck* dan *cross check* dengan model triangulasi, selanjutnya disusun permasalahan yang muncul secara sistematis. Ringkasan permasalahan tersebut diajukan kepada *stakeholder* dalam diskusi *stakeholder* atau FGD. Seluruh hasil analisis data baik berupa wawancara, angket dan diskusi *stakeholder* selanjutnya dianalisis dengan menggunakan 6 tahapan dalam *soft systems methodology* yang telah diuraikan diatas.

Penelitian kualitatif pada dasarnya meliputi tahap pencarian data atau pengamatan di lapangan yang dikenal dengan tahap empiris dan tahap menganalisis data atau disebut tahap *interpretative*. Tahap pertama dilakukan melalui jalan memahami seperangkat ide dan teori yang dibangun dan dikomunikasikan dengan fakta. Kumpulan fakta tersebut selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan teori yang ada dan dapat dilakukan perluasan analisis melalui teori yang dikembangkan diluar teori awal. Hal ini merupakan kaidah dasar dari sebuah penelitian kualitatif dan lebih melakukan upaya pembangunan realitas daripada generalisasi.

Data-data diatas selanjutnya disusun berdasarkan tindakan serta membandingkan sumber tertulis (dokumen-dokumen), catatan lapangan, peta dan data statistik. Lebih lanjut data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui dua kegiatan;

- 1) Melakukan proses kegiatan penyusunan satuan data
- 2) Melakukan kategorisasi dengan cara menentukan kategori data yang diperoleh dan selanjutnya menempatkan data pada kategorinya masing-masing.

3.5. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif menggunakan dua model, pertama dengan menggunakan SNA (Social Networking Analysis) dan kedua menggunakan PLS (*Partial least square*).

3.5.1. Social Networking Analysis

Data kuantitatif yang pertama bersumber dari data angket yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antar stake holders dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Untuk mengetahui bagaimana pola hubungan, maka peneliti menggunakan pendekatan *Social Networking Analysis* atau SNA. Menurut Valdis Krebs, "*Social network analysis is the mapping and measuring of relationships and flows between people, groups, organisations, computers or other information/knowledge processing entities.*" Maksudnya adalah bahwa analisis hubungan sosial merupakan pemetaan dan sekaligus untuk memastikan hubungan dan aliran hubungan antar seseorang, kelompok,

organisasi, komputer maupun informasi atau pengetahuan lainya dalam sebuah perkumpulan.

Sebagai unit analisis dalam penelitian kolaborasi, terdapat empat level yaitu individual, kelompok, organisasi dan antar organisasi.⁹² Yerkait dengan penelitian tentang *collaborative governance* dalam pengelolaan Kawasan perbatasan, maka yang menjadi unit analisisnya adalah pada level organisasi yaitu antara Lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan. Dengan menggunakan Social Networking Analysis (Gephi 0.9.1) maka akan diketahui *tingkat keterpusatan* dan *derajat* kolaborasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Kepulauan Riau.

Dengan menggunakan SNA ini, maka peneliti akan mengetahui Gambar Jaringan atau *Network Overview* yang dapat dilihat dari beberapa hasil statistik Gephi 0.9.1 diantaranya;

- a) Derajat Node dan Derajat Rata-rata (*Average Degree*). Peran kunci dari setiap node dalam sebuah jaringan adalah derajatnya. Derajat dari node dinotasikan sebagai jumlah link yang insiden dengan node tersebut atau dengan kata lain derajat adalah banyaknya node yang berdampingan atau berbatasan (*adjacent*) dengan node itu. Misalkan n adalah jumlah node dalam suatu

⁹² Jones, Gareth R, 2001. *Organizational theory; Text and Case* , New York, hal 371.

jaringan tak berarah maka jumlah total dari link L dapat diekspresikan sebagai jumlah derajat node-node nya

b) Sentralitas (*Centrality*). Konsep sentralitas menangkap tentang menonjol atau tidaknya suatu node dalam jaringan. Sentralitas adalah ukuran dalam graf yang digunakan dalam analisis jaringan untuk menemukan struktur penting dari node dan edge. Sentralitas umumnya menetapkan pentingnya suatu node hanya berdasarkan struktur graf. Definisi yang paling sederhana dari sentralitas node adalah bahwa node sentral haruslah node yang paling aktif atau node yang memiliki ikatan paling banyak dengan node lain dalam jaringan. Misalkan dalam suatu organisasi seseorang dengan hubungan atau komunikasi yang ekstensif dengan banyak orang lain dalam organisasi dinilai lebih penting daripada orang lain dengan kontak yang lebih sedikit. Sentralitas adalah ukuran dalam level node sedangkan sentralisasi adalah ukuran dalam level jaringan. Ada empat ukuran dalam sentralitas yang digunakan secara luas dalam analisis jaringan yaitu: derajat sentralitas (*degree centrality*), kedekatan (*closeness*), keantaraan (*betweenness*), dan *eigenvector centrality*.

a) Derajat sentralitas sentralitas (*degree centrality*) didefinisikan sebagai jumlah link yang incident atas suatu node (jumlah ikatan yang dimiliki node).

- b) *Closeness Centrality* atau kedekatan antar node merupakan jarak terpendek terhadap node-node yang lain. Contohnya dalam pemilihan lokasi yang cocok untuk mall/supermarket dalam suatu kota dengan tujuan meminimumkan jarak para konsumen. Ukuran ini menggambarkan kedekatan node ini dengan node lain. Semakin dekat maka menunjukkan semakin terhubung lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Analoginya adalah tipe orang “gaul” yang kenal dengan semua orang akan memiliki pengaruh yang lebih besar karena dapat menyebarkan informasi lebih cepat tanpa perlu perantara pihak ketiga.
- c) *Betweenness Centrality* menandai pentingnya node berdasarkan jumlah *shortest path* yang melaluinya. Jika ada dua node yang saling berdekatan, yaitu v dan w , ingin berinteraksi dan node u berada pada lintasan hubungan antara v dan w , maka u memiliki kontrol terhadap interaksi keduanya dan *betweenness* mengukur kontrol tersebut. Jika u berada pada lintasan dari beberapa interaksi maka u adalah sebuah node yang penting atau berpengaruh. Dengan kata lain bahwa *betweenness centrality* merupakan ukuran untuk memperlihatkan peran sebuah node menjadi *bottleneck*. Node menjadi penting jika menjadi *communication bottleneck*. Analoginya sebuah persimpangan (node). Persimpangan akan semakin

“berarti” jika semakin banyak jalan yang harus melewati persimpangan itu sehingga dapat diartikan tidak ada jalan alternatif lain sehingga persimpangan tersebut semakin dianggap penting atau berarti. Jika pada persimpangan tersebut lampu lalulintasnya mati, maka dapat berakibat fatal karena aliran mobil (informasi/komunikasi) akan semakin terhambat. Ukuran ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi *boundary spanners*, yaitu lembaga atau node yang berperan sebagai penghubung (jembatan) antara dua komunitas. *Betweenness* centrality sebuah node dihitung dengan menjumlahkan semua *shortest path* yang menghubungkan node tersebut.

3.5.2. Partial Least Square

Selain menggunakan tools berupa SNA untuk mengetahui bagaimana pola hubungan antar aktor, peneliti menggunakan PLS (*Partial Least Square*) yang berguna untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi variabel CG.

Tahapan pengujian PLS dilakukan meliputi uji indikator atau disebut juga *Outer model* atau *measurement model* adalah menguji hubungan antara indikator terhadap variabel konstruknya. Dari uji indikator ini diperoleh output validitas dan realibilitas model yang diukur dengan kriteria: *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, dan *Composite Reliability*. *Convergent Validity* diukur dari korelasi antara skor indikator dengan konstruknya. Indikator individu dianggap valid

jika memiliki nilai korelasi di atas 0,50. Apabila ada indikator yang tidak memenuhi syarat ini maka harus dibuang. *Discriminant Validity* yang diukur dari *cross loading* antara indikator dengan konstruknya. Indikator dinyatakan valid jika hubungan indikator dengan konstruknya lebih tinggi dibandingkan dengan hubungannya dengan konstruk yang lain. Konstruk dinyatakan reliabel apabila *composite reliability* memiliki nilai diatas 0,70.

$P < 0.5$ (5%) = signifikan
 $P \geq 0.5$ (5%) = tidak signifikan

Keterangan: P adalah Probality atau Peluang Tingkat Kesalahan.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat hubungan antara faktorf dengan CG maka digunakan interpretasi koefisien korelasi. Untuk menginterpretasikan nilai koefisien korelasi antara faktor-faktor yang membentuk CG, maka digunakan interpretasi sebagaimana yang dinyatakan oleh Riduwan sebagai berikut⁹³:

Tabel 3. 2 Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0.00-0.199	Sangat Rendah
0.20-0.399	Rendah
0.40-0.599	Cukup
0.6-0.799	Kuat
0.80-1.00	Sangat Kuat

⁹³ Riduwan, op. cit.,h. 228.

3.6. Urgensi Penelitian dan Keterbatasan Peneliti.

Ada dua alasan utama sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pola *Collaborative Governance* dalam pengelolaan Kawasan perbatasan di Kepulauan Riau. *Pertama*, banyaknya permasalahan yang dihadapi daerah yang berbatasan dengan negara-negara tetangga adalah lebih disebabkan oleh adanya pola *collaborative governance* yang tidak tepat. *Kedua*, belum ada peneliti yang mengemukakan pola *collaborative governance* dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan.

Disamping melihat urgensi penelitian diatas, peneliti juga harus jujur menyampaikan bahwa peneliti juga memiliki keterbatasan. Ada tiga keterbatasan yang peneliti alami; *Pertama*, keterbatasan yang melekat pada diri peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian, sedangkan posisi peneliti bukanlah menjadi kunci dari pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kepulauan Riau. Dengan posisi yang demikian maka subjektifitas dalam melakukan penelitian mungkin saja terjadi. Keterbatasan ini dapat peneliti kurangi dengan meminta saran, pendapat, masukan, dan koreksi dari pihak diluar dari *stakeholder* yang terkait baik secara langsung maupun tidak dalam pengelolaan Kawasan Perbatasan seperti akademisi dan praktisi serta dari Tim Penguji itu sendiri. Berbagai saran, pendapat dan masukan dari pihak diluar tersebut, peneliti anggap merupakan pihak yang netral, tidak terafiliasi dengan lembaga yang memiliki tugas dan wewenang serta memiliki jarak terhadap

subjek penelitian. Dengan demikian maka diharapkan saran, pendapat dan masukan yang disampaikan dapat membantu mengurangi berbagai bias yang mungkin timbul terkait dengan posisi peneliti.

Keterbatasan yang *kedua* adalah terkait dengan keterbatasan informasi yang berhasil diperoleh melalui wawancara oleh peneliti. Keterbatasan ini akibat dari posisi peneliti yang tidak memiliki kewenangan untuk “memaksa” pihak-pihak yang terlibat secara langsung atas pengelolaan Kawasan Perbatasan di Kepulauan Riau. Dengan demikian maka masih ada kemungkinan informasi yang tidak diungkapkan oleh informan. Keterbatasan yang terakhir atau *ketiga* yaitu peneliti sangat mengandalkan hasil wawancara dan angket dari para informan/responden sebagai sumber data primer. Oleh sebab itu peneliti akan berupaya melakukan konfrontasi atau diskusi atas hasil pengolahan data yang diperoleh. Aktifitas ini akan berguna untuk memvalidasi data yang telah diperoleh.

3.7. Kerangka Berfikir

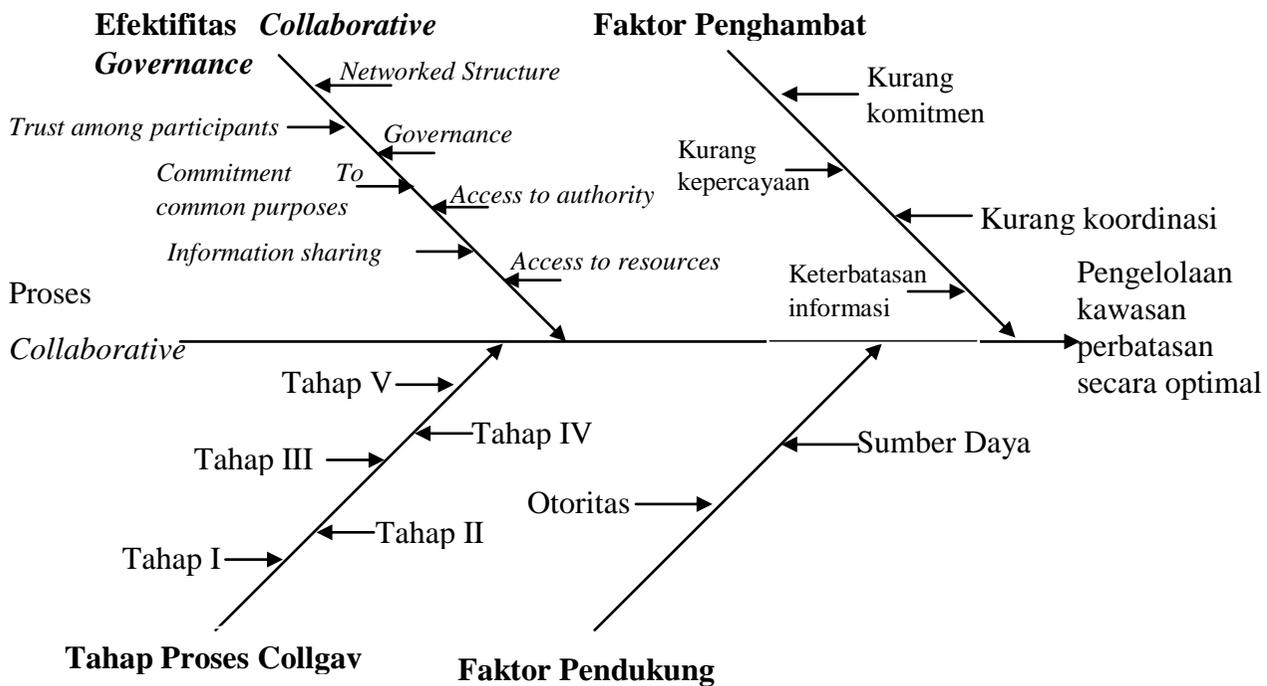
Kepulauan Riau merupakan salah satu Provinsi yang memiliki 19 (sembilan belas) pulau yang berbatasan dengan negara tetangga. Berbagai persoalan dihadapi oleh Provinsi Kepulauan Riau dalam mengelola perbatasan mulai dari aksi-aksi illegal hingga penyerobotan tapal batas laut. Kondisi inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini. Kawasan perbatasan yang ada di Kepulauan Riau hingga saat ini masih rawan terhadap berbagai aksi *illegal* mulai dari

illegalfishing, *illegal mining*, *trafficking* dan berbagai aksi penyelundupan barang-barang *illegal* seperti barang bekas, narkoba dan lain-lain. Untuk itu peneliti ingin mengetahui mengapa kondisi tersebut masih terjadi, padahal terdapat berbagai institusi/*stakeholders* yang memiliki kewenangan mengelola kawasan perbatasan diantaranya adalah Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten dan Kota, Badan Pengelola Perbatasan Provinsi hingga Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Untuk mengetahui bagaimana kolaborasi terjadi antar *stakeholder* tersebut penulis menganalisis dengan menggunakan indikator yang menyebabkan pada keberhasilan atau kegagalan kolaborasi sebagaimana yang disampaikan oleh De seve yang meliputi (1) tipe *networked structure* (jenis struktur jaringan), (2) *commitment to a common purpose* (komitmen terhadap tujuan), (3) *trust among the participants* (adanya saling percaya diantara para pelaku/peserta yang terangkai dalam jaringan), (4) *governance* (termasuk: a) adanya saling percaya diantara para pelaku, b) ada batas-batas siapa yang boleh terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat, c) aturan main yang jelas yang disepakati bersama, dan d) kebebasan menentukan bagaimana kolaborasi dijalankan); (5) *access to authority* (akses terhadap kekuasaan), (6) *distributive accountability/responsibility* (pembagian akuntabilitas/responsibilitas), (7) *information sharing*, (berbagi informasi) dan (8) *access to resources* (akses terhadap sumberdaya).⁹⁴

⁹⁴ Sudarmo, op. cit., hh. 110-116.

Dari hasil analisis maka dapat diketahui faktor yang mendukung dan menghambat kolaborasi dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Dengan adanya kolaborasi dari beberapa *stakeholder* diharapkan pengelolaan kawasan perbatasan bisa lebih optimal sehingga keamanan NKRI dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Berikut kerangka berfikir model *fish bone* dalam penelitian ini;

Bagan 3. 2 Kerangka Berfikir Model Fish Bone



Sumber: Data yang diolah, 2016

3.8. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas sifat-sifat dari variabel yang sedang diamati yaitu berkaitan dengan Collaborative. Definisi operasional akan sangat berguna untuk memperjelas konsep-konsep penting dalam Collaborative. Dengan demikian maka definisi operasional harus bersifat spesifik, rinci, tegas dan pasti yang menggambarkan karakteristik variabel-variabel penelitian dan hal-hal yang dianggap penting. Definisi operasional ini disusun untuk memperjelas dan mempertegas ruang lingkup dari penelitian yang sedang dilakukan secara operasional, secara praktik, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat.

Variable utama penelitian ini adalah *Collaborative Governance*. mengacu pada pendapat Noorsyamsa Djumara terdapat 5 (lima) dimensi variabel turunannya yaitu;⁹⁵

1. *Collaborative Culture*. Merupakan Nilai-nilai yang diyakini secara bersama dan dapat membantu untuk memahami fungsi masing-masing organisasi serta memberikan norma dalam berperilaku.
2. *Collaborative Leadership*. Merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih yang saling bekerjasama untuk tujuan bersama dengan

⁹⁵ Noorsyamsa Djumara, op. cit., hh. 34-35

- berbagi tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas untuk mencapai.
3. *Strategic Vision*. Merupakan prinsip-prinsip yang menjadi pemandu dan sekaligus tujuan keseluruhan dari organisasi pengelola perbatasan.
 4. *Collaborative Team Process*. Merupakan tim diluar struktur yang ada dan dibentuk untuk menagani permasalahan dalam mengelola Kawasan Perbatasan.
 5. *Collaborative Structure*. Merupakan unit/ lembaga yang memiliki fungsi dalam mengelola Kawasan Perbatasan.

Tabel 3. 3 Dimensi Variabel dan Skala Pengukuranya

Jenis Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Skala pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>Collaborative Culture (Y1)</i>	Nilai-nilai yang diyakini secara bersama dan dapat membantu untuk memahami fungsi masing-masing organisasi serta memberikan norma dalam berperilaku.	Kooperasi (Y1.1)	Kerjasama untuk pembangunan keberlanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati bersama	Likert
		Koordinasi (Y1.2)	Intensitas pertemuan antar stake holder pengelola perbatasan:	Likert
			Memberikan peluang keterlibatan instansi atau masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan perbatasan	Likert
			Melibatkan pemerintah daerah dalam perumusan, implementasi, monitoring dan evaluasi program	Likert

Jenis Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Skala pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Komunikasi (Y1.3)	Sharing informasi, melalui kegiatan rutin seperti dialog tatap muka, musrenbang, dll.	Likert
			Keterbukaan informasi	Likert
<i>Collaborative Leadership</i> (Y2)	Adanya hubungan antara dua pihak atau lebih yang bekerja saling bekerjasama untuk tujuan bersama dengan berbagi tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas untuk mencapai Hasil yang diinginkan.	Tanggungjawab b/ pembagian tugas (Y2.1)	Kesadaran bahwa pengelolaan wilayah perbatasan menjadi tanggung jawab bersama	
			Adanya pembagian tugas yang jelas antara BNPP dengan BPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	
		Pembagian wewenang (Y2.2)	Adanya Nota Kesepahaman atau MoU antar lembaga	

Jenis Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Skala pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Adanya pertanggungjawaban (Y2.3)	Rapat evaluasi kegiatan	
			Laporan berkala (Triwulan, Semester dan tahunan)	
			Pemantauan dan evaluasi rutin untuk menilai komitmen dan kinerja setiap lembaga yang terlibat dalam pengelolaan kawasan perbatasan.	
<i>Strategic Vision (Y3)</i>	Adanya prinsip-prinsip yang menjadi pemandu dan sekaligus tujuan keseluruhan dari organisasi pengelola perbatasan	Jangka panjang (Y3.1)	Adanya <i>blue print</i> /cetak biru pengelolaan Kawasan Perbatasan	
		Jangka menengah (lima tahunan) (Y3.2)	Ketersediaan Rinduk	

Jenis Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Skala pengukuran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Jangka pendek (tahunan) (Y3.3)	Adanya Renstra	
<i>Collaborative Team Process</i> (Y4)	Adanya tim dalam satu lembaga atau lintas lembaga yang dibentuk untuk menangani permasalahan tertentu yang terjadi di Kawasan Perbatasan	Tim Internal Pemerintah (Y4.1)	Adanya Tim Internal (lembaga pemerintah)	
		Tim Eksternal (Y4.2)	Adanya Tim Eksternal Pemerintah	
			Adanya keterlibatan lembaga non pemerintah	
		<i>Task Force</i> yang terdiri dari lintas Lembaga (Y4.3)	Tim Gabungan (gabungan antara lembaga pemerintah dan non pemerintah)	
<i>Collaborative Structure</i> (Y5)	Membentuk unit/ lembaga baru guna mengelola Kawasan Perbatasan	Adanya UPTD (Y5)	Adanya lembaga yang dibentuk secara bersama-sama	

3.9. Publikasi

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program doktor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka mahasiswa diwajibkan untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal internasional terakreditasi. Peneliti memilih Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada. JKAP merupakan salah satu jurnal yang telah mendapatkan akreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 36b / E / KPT / 2016 PERIODE: 2016-2021 sebagai jurnal ilmiah. JKAP berfokus pada tema-tema yang berkaitan dengan administrasi publik.

JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) memiliki dua versi yaitu versi cetak dan online. Versi cetak dengan nomor ISSN 0852-9213, sedangkan untuk versi online dengan nomor ISSN 2477-4693. JKAP juga telah diindeks di beberapa lembaga pengindeks diantaranya:

1. DOAJ (Directory of Open Access Journal)
2. Crossref
3. Index Copernicus International
4. Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
5. Indonesian Scientific Journal Database (ISJD)>> Type the keywords "Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik"
6. Indonesian Publication Index (IPI)
7. ROAD

8. CORE
9. Google Scholar
10. Indonesia One Search
11. WorldCat
12. Research Gate
13. LIVIVO
14. Copac JIST
15. Academia.Edu
16. CiteUlike
17. Academic Resource Index
18. Scholarsteer
19. Harvard Library
20. Academic Keys
21. Electronic Journals Library
22. Columbia University Libraries
23. Leiden University Libraries
24. University of Saskatchewan-Canada
25. Gent University Library
26. Boston University Library
27. Western Theological Seminary
28. University of Oxford
29. Harvard University library
30. The University of Sheffield
31. The University of Manchester